



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 06 Juli 2026

Halaman: 2

TERAS
Shelter Gepeng
OPERASI gabungan yang digelar di jalanan jantung Kota Yogyakarta membuka mata kita bahwa penataan kota tidak melalui soal estetika fisik. Langkah taktis yang melibatkan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Satpol PP, Kepolisian, Linmas, serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ini berhasil menjengkau 13 orang gelandangan dan pengemis (gepeng).
Petugas membawa gepeng ke Shelter Kesejahteraan Sosial untuk beristirahat dan menjalani asesmen dalam upaya penegakan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 yang humanis. Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari betul bahwa di balik potret kemiskinan di persimpangan jalan, terdapat kompleksitas persoalan yang rumit mulai dari keterbatasan akses lapangan kerja hingga korelasi hubungan keluarga. Oleh karena itu, penanganan yang tidak berhenti pada penertiban, namun dianjuk dengan perlindungan.
Fakta bahwa sebagian besar warga yang terjaring berasal dari luar daerah, seperti Garut dan Temanggung, menunjukkan bahwa fenomena gepeng di Yogyakarta adalah residu dari mobilitas sosial antardaerah yang tak terkendali. Daya tarik Yogyakarta sebagai kota budaya dan pariwisata sering kali disalahpahami sebagai ladang rezeki, yang kemudian memicu urbanisasi tanpa modal keterampilan. Realitas ini menegaskan bahwa penanganan gepeng tidak bisa dibebankan kepada pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan komitmen lintas wilayah dan koordinasi antarpemerintah daerah yang sistematis.
Rencana pemulangan para penghuni shelter ke daerah asal masing-masing setelah proses asesmen selesai memang menjadi solusi jangka pendek yang logis. Meski demikian, langkah ini harus diikuti dengan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah tujuan agar proses reintegrasi sosial berjalan mulus. Tanpa adanya jaminan pembinaan atau akses ekonomi di daerah asal, kebijakan pemulangan ini dikhawatirkan hanya akan menjadi siklus berulang, di mana mereka yang dipulangkan hari ini bisa saja kembali ke jalanan Yogyakarta di kemudian hari.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005